



LAPORAN KINERJA

Balmon SFR Kelas II Padang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	113,77%	142,21 %
	2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	112,06%	112,06%
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
	2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	≥94 (dari skala 100)	91,17	97,84%

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2019, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

Melalui Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tahun 2019, melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Februari 2020

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PADANG**

Tertanda

ZAINULLAH MANAN, ST., MT

DAFTAR ISI

halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS.....	6
BAB II PERJANJIAN KINERJA	7
A. SASARAN PROGRAM.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	9
1. IK-1.1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.....	9
2. IK-1.2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio.....	18
SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.....	27
1. IK-2.1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	27
2. IK-2.2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).....	29
B. KINERJA LAINNYA	31
C. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP	33

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari, Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan

sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktur Operasi Sumber Daya.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio

3. Seksi Sarana dan Pelayanan

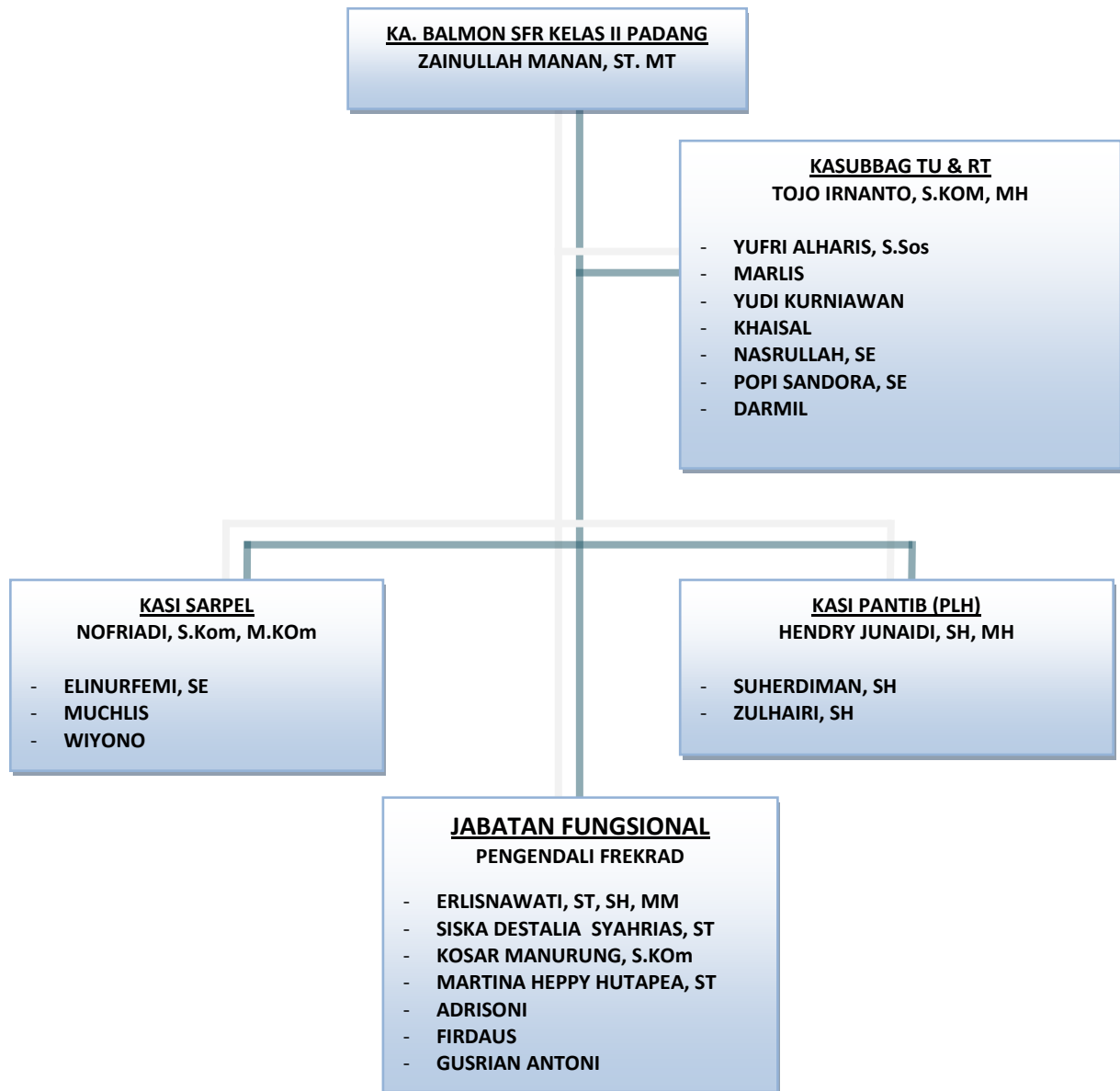
Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDPPI



Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Padang

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 12 Kabupaten dan 7 kota, terdiri dari 179 kecamatan, dengan luas wilayah Luas Provinsi Sumatera Barat 42.012,89 km² dan penduduk wilayah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5.441.197 jiwa. Di Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada 1 (satu) Kabupaten/Kota saja namun menyebar seperti pembangunan Transportable, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara *broadcasting*, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh, dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR). Berdasarkan Peraturan Menkominfo RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkominfo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balmon SFR Kelas II Padang disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon SFR Kelas II Padang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat utama monitoring/ukur maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balmon SFR Kelas II Padang saat ini secara jumlah masih terbatas sehingga dibutuhkan revitalisasi atau pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru.
2. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon SFR Kelas II Padang yang memiliki kompetensi Teknis cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*)
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*capacity Building*) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
4. Regulasi penggunaan spektrum belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.
5. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN PROGRAM

Eselon II	Kepala UPT	Eselon IV UPT
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	Seksi Pemantauan dan Penertiban 1. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota 2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable 3. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur 4. Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal 5. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi 6. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR 7. Persentase penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio
	Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	Seksi Sarana dan Pelayanan 1. 85% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT 2. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT 3. Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL 4. Jumlah Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio 5. Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga 1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku 2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku 3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT 4. Jumlah dokumen keuangan UPT
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	113,77%	142,21 %
	2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	112,06%	112,06%
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
	2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	≥94 (dari skala 100)	91,17	97,84%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang pada tahun 2019 adalah sebesar 20.065.243.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2019 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. IK-1 1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT

Tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang telah menandatangani perjanjian kinerja, salah satunya 80% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II antara lain :

a. Observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota

Indikator Kinerja **Persentase (%) Observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota** memiliki target sebesar 80 %. Pada tahun 2019, kegiatan observasi dan monitoring frekuensi terlaksana di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Sumatera Barat. Persentase okupansi kabupaten kota sebesar 89,47%. Sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 111.84 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota	80%	89.47%	89.47%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota **terlaksana melampaui target yang di tetapkan 80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.**

Capaian okupansi kabupaten/kota perbulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Bulan	Jumlah Kabupaten/Kota Termonitor		Capaian (%)
		Akumulasi Okupansi	Kabupaten/Kota	
1	Januari	1	Kota Padang	5,26
2	Februari	4	Kota Sawahlunto	21,05
			Kota Pariaman	
			Kab. Padang Pariaman	
3	Maret	6	Kota Payakumbuh	31,58
			Kab. Tanah Datar	
4	April	8	Kab. Sijunjung	42,11
			Kab. Pesisir Selatan	
5	Mei	11	Kota Bukittinggi	57,89
			Kab. Solok	
			Kota Solok	
6	Juni	13	Kab. Agam	68,42
			Kab. Pasaman	
7	Juli	14	Kab. Pasaman Barat	73,68
8	Agustus	16	Kab. 50 Kota	84,21
			Kab. Solok Selatan	
9	September	16	-	84,21
10	Oktober	16	-	84,21
11	November	16	-	84,21
12	Desember	17	Kota Padang Panjang	89,47

Hasil kegiatan observasi dan monitoring pita frekuensi di 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota berdasarkan klasifikasi identifikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kota/Kabupaten	Hasil Pemantauan dan Observasi					
		Legal	Ilegal	Tidak Sesuai ISR	Belum Diketahui	Total Teridentifikasi	Total Termonitor
1	Kab. Agam	61	4	4	0	69	69
2	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Lima Puluh Kota	54	0	0	0	54	54
5	Kab. Padang Pariaman	95	0	0	11	95	106
6	Kab. Pasaman	30	1	0	1	31	32
7	Kab. Pasaman Barat	26	0	0	0	26	26
8	Kab. Pesisir Selatan	19	0	0	2	19	21
9	Kab. Solok	44	0	0	0	44	44
10	Kab. Solok Selatan	9	1	0	0	10	10
11	Kab. Tanah Datar	114	0	0	0	114	114
12	Kab. Sijunjung	19	4	0	1	23	24
13	Kota Bukittinggi	71	0	0	0	71	71
14	Kota Padang Panjang	29	0	0	0	29	29
15	Kota Pariaman	51	0	0	3	51	54
16	Kota Payakumbuh	28	3	0	1	31	32
17	Kota Sawahlunto	17	2	0	0	19	19
18	Kota Solok	49	2	0	0	51	51
19	Kota Padang	255	7	1	4	263	267
TOTAL		971	24	5	23	1000	1023



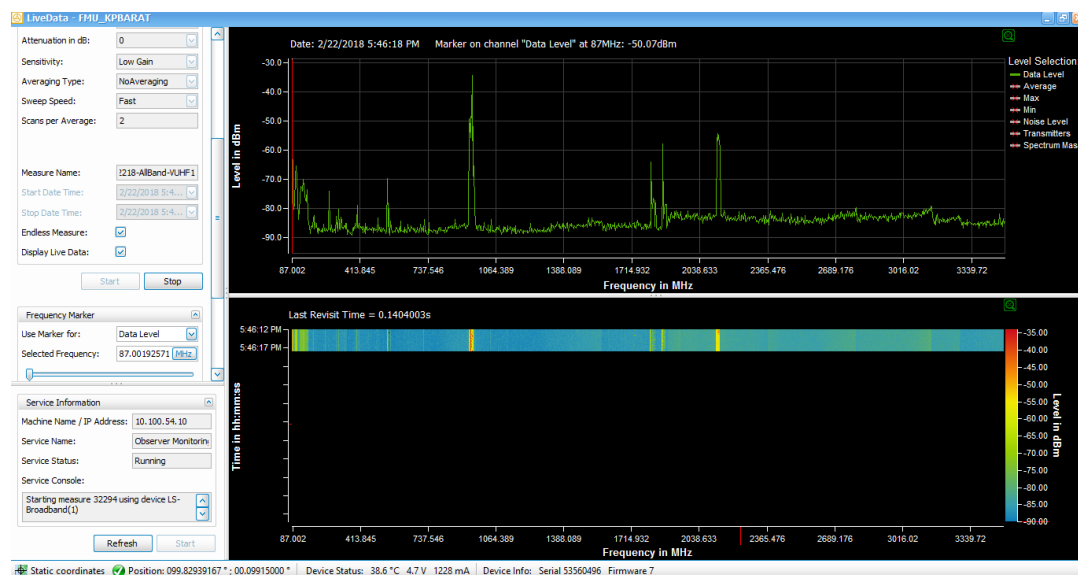
b. Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable

Indikator Kinerja Persentase (%) **Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable** memiliki target realisasi 12 laporan. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah 12 laporan sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan Monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	100%	100%	100%

Balmon Kelas II Padang memiliki 2 (dua) stasiun tetap transportable yaitu di Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman dan Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat..



Pada tahun 2019, setiap bulan terlaksana kegiatan monitoring menggunakan stasiun tetap transportable FMU Padang Pariaman dan FMU Pasaman Barat, ada 12 laporan hasil monitoring untuk masing-masing stasiun.

NO	BULAN	JUMLAH LAPORAN MONITORING STASIUN TRANSPORTABLE	
		PADANG PARIAMAN	PASAMAN BARAT
1	Januari	1	1
2	Februari	1	1
3	Maret	1	1
4	April	1	1
5	Mei	1	1
6	Juni	1	1
7	Juli	1	1
8	Agustus	1	1
9	September	1	1
10	Oktober	1	1
11	November	1	1
12	Desember	1	1
JUMLAH TOTAL		12	12

c. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur

Indikator Kinerja **Persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur** memiliki target realisasi sebesar 35%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 87.74 % sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 250.68%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	35%	87.74%	250.68%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH ISR RADIO DAN TV DI DATABASE	JUMLAH STASIUN RADIO DAN TV SIARAN		
			TERUKUR	AKUMULASI TERUKUR	TERUKUR TERHADAP DATA ISR (%)
1	Januari	106	6	6	5,66
2	Februari	106	10	16	15,09
3	Maret	106	16	32	30,19
4	April	106	4	36	33,96
5	Mei	106	15	51	48,11
6	Juni	106	1	52	49,06
7	Juli	106	15	67	63,21
8	Agustus	106	3	70	66,04
9	September	106	7	77	72,64
10	Oktober	106	12	89	83,96
11	November	106	3	92	86,79
12	Desember	106	1	93	87,74

Jumlah stasiun radio siaran FM dan televisi siaran yang diukur parameter teknis dan jangkauan siarannya sejumlah 93 stasiun dengan persentase 87,74% dari total 106 radio dan tv siaran yang memiliki Izin Stasiun Radio. Indikator **Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.**

d. Tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal

Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal memiliki target realisasi sebesar 50 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 200%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal	50%	100%	200%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

NO	TANGGAL	LOKASI	TARGET PENERTIBAN (FREKUENSI/ DINAS)	STASIUN ILEGAL/ TIDAK ADA IZIN	STATUS S.D 31 DES 2019		KETERANGAN
					ISR	NON ISR	
1	9-13 Des	Kab. Pasaman Barat	Microwave Link	4	4	0	ISR sudah terbit, perangkat sudah dikembalikan
2	28 Okt-1 Nov	Kota Padang	Komunikasi Radio / Konsesi	6	2	4	Yang sudah memiliki ISR 2 instansi, 4 instansi/badan usaha lain sedang proses pengurusan ISR
3	2-6 Juli	Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Pesisir Selatan	Microwave Link	15	15	0	ISR sudah terbit, perangkat sudah dikembalikan
4	2-6 Juli	KOTA BUKITTINGGI, KOTA SOLOK DAN KAB. SOLOK	Microwave Link	84	84	0	ISR sudah terbit, perangkat sudah dikembalikan

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Indikator **tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.**

e. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi memiliki target realisasi 1 laporan. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 3 laporan sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 300%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	1 laporan	3 laporan	300%

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang melaksanakan kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Tanggal Monitoring	Jumlah Perangkat Dimonitor	
			Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1	Kota Padang	29 April - 3 Mei 2019	111	6
2	Kota Bukittinggi	22 Mei 2019	37	-
3	Kab.Agam	19 Juni 2019	5	-
Total			153	6

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa indikator **Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.**

f. Pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR memiliki target realisasi sebesar 85 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 99.35 % sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 116.88 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	Pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85 %	99.35 %	116.88%

Dari indikator di atas, dapat di rinci hasil kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR yang di Inspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi				Tindak Lanjut Hasil Inspeksi		CAPAIAN (% VALID) Frekuensi Sesuai ISR+Frekuensi yang Sudah Ditindaklanjuti)/Total Data ISR yang Diinspeksi
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR	Stasiun Radio Tidak Aktif	Proses ISR	Sudah Ditindak Lanjuti	Belum Ditindak Lanjuti	
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	651	354	232	64	1	296	0	99,85%
2	TELEKOMUNIKASI SELULER	623	416	110	54	43	164	0	93,10%
3	XL AXIATA	1039	570	161	41	267	202	0	74,30%
4	INDOSAT	487	173	25	287	2	312	0	99,59%
5	HUTCHISON	249	186	15	39	9	54	0	96,39%
6	SMARTFREN	24	18	3	3	0	6	0	100,00%
6	KOMRAD	68	65	0	3	0	3	0	100,00%
7	RADIO KONSESI	48	17	28	3	0	31	0	100,00%
	TOTAL	3189	1799	574	494	322	1068	0	89,90%

g. Persentase penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio

Indikator Kinerja Persentase (%) Persentase penyelesaian aduan/klaime dan konsultasi yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 95%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100 % sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	Persentase penyelesaian aduan/klaime dan konsultasi yang diselesaikan	95 %	100 %	105.26%

Pada tahun 2019 ada 5 (lima) aduan gangguan yang diterima oleh Balmon SFR Kelas II Padang dan dapat ditangani dengan baik.

NO.	PENGADUAN			FREKUENSI TERGANGGU (MHz)	PIHAK TERGANGGU	PIHAK PENGANGGU	STATUS
	NOMOR	AWAL	SELESAI				
1	ME.106/077/PDG/I/2019	28-01-2019	02-02-2019	5.640	BMKG PADANG	PT. ENET BIARO AKSES	CLEAR
2	STI/Reg/ST/SK/0318-III.2019	05-03-2019	04-12-2019	450	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	Gangguan Internal	CLEAR
3	ME.106/188/PDG/I/2019	25-03-2019	04-05-2019	5640	BMKG Stasiun Meteorologi Minang Kabau Padang	Wanxp (ISP) /Client Hotel bunda Padang	CLEAR
4	B/54/IV/2019	05-04-2019	05-20-2019	457,5	TNI AD	BELUM DIKETAHUI	CLEAR
5	190/ORDA-SB/XII/2019	19-12-2019	12-30-2019	145,7	ORARI Daerah Sumatera Barat	PT. Irama Mitra Media	CLEAR

2. IK-1.2 Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menargetkan 100% pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio. Adapun beberapa indikator untuk mewujudkan target tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT sebanyak 85%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT memiliki target sebesar 85 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 85,29%, **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100,34%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penangangan BHP Frekuensi Radio	berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%	85,29%	100,34%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT **terlaksana melampaui target yang di tetapkan 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.**

b. Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT

Indikator Kinerja Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT memiliki target sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 200%, **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 200%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penangangan BHP Frekuensi Radio	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio	100%	200%	200%

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut :

1) Kegiatan dengan menghadirkan Masyarakat :

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Tema kegiatan
1	8 Agustus 2019	Kota Padang	Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio bagi pelayaran rakyat dalam rangka perizinan ISR online Maritim On The Spot (MOTS)

2	19 September 2019	Kota Bukittinggi	Sosialisasi Penggunaan frekuensi Radio dan Bimtek Perizinan Frekuensi Radio
---	-------------------	------------------	---

2) Kegiatan dengan langsung terjun ke lapangan dalam rangka MOTS :

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	16 s.d. 18 Oktober 2019	Kab. Agam dan Kota Pariaman
2	21 s.d. 25 Oktober 2019	Kab. Pasaman Barat
3	29 Oktober s.d. 2 November 2019	Tarusan Kab. Pesisir Selatan
4	9 s.d. 13 Desember 2019	Kambang Kab. Pesisir Selatan

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio terlaksana **melampaui target yang ditetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.**



c. Laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL

Indikator Kinerja Pelaksanaan Laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL memiliki target sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	Laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	100%	100%	100%

Dari penjelasan di atas, dapat kami sampaikan daftar rekapitulasi progres pencapaian penanganan piutang oleh KPKNL Padang dan Bukittinggi sampai akhir Desember 2019.

No	Nama Wajib Bayar / Penanggung Hutang	Nama KPKNL	Nilai Penyerahan	Tahun Pelimpahan	Tahapan Pengurusan	Pemindahbukuan				PSBDT	Sisa Piutang	Ket
						Lunas	Angsuran	H2H	Tanggal			
1	2	6	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CAHAYA BINTANG ANDALAS,PT	KPKNL Padang	3,063,368	Nov-12	Surat Paksa						3,063,368	
2	TRIO UTAMA PARIAMAN, PT	KPKNL Padang	20,175,996	Nov-12	Surat Paksa						20,175,996	
3	RADIO SUARA SUBUH, PT.	KPKNL Padang	4,534,151	Nov-12	Surat Paksa				12/11/2019	4,534,151	4,534,151	
4	AGROWIRATAMA, PT	KPKNL Padang	2,443,025	Mar-17	Surat Paksa				6/20/2017	2,443,025	2,443,025	
5	KOPERASI ANDALAS MADANI	KPKNL Padang	2,448,689	Mar-17	Surat Paksa				6/20/2017	2,448,689	2,448,689	
6	PUTRA DAERAH, PT	KPKNL Padang	2,410,177	Mar-17	Surat Paksa				6/20/2017	2,410,177	2,410,177	
7	SUMATERA SAFARI INDRAPUR, PT.	KPKNL Padang	1,673,046	Mar-17	Surat Paksa				6/20/2017	1,673,046	1,673,046	
8	MULTI MUTICORPORATAMA (MMC), PT (CAB. PADANG)	KPKNL Padang	2,219,001	Mar-17	Surat Paksa				6/20/2017	2,219,001	2,219,001	
9	RADIO TASSA, PT	KPKNL Padang	6,149,732	Mar-17	Surat Paksa				6/20/2017	6,149,732	6,149,732	
10	KOPERASI SOPIN TAKSI (KOSTI) PADANG	KPKNL Padang	16,672,092	Mar-17	Surat Paksa		2,918,180				13,753,912	
11	RADIO DAPILAR, PT	KPKNL Padang	2,121,830	Mar-17	Surat Paksa						2,121,830	
12	PEMERINTAH KAB.PESISIR SELATAN(KANTOR INFORMASI,KOMUN&ARSIP)	KPKNL Padang	76,977,858	Mar-17	Surat Paksa						76,977,858	
13	SUNDAWA SENTANA,PT.	KPKNL Padang	2,544,832	Mar-17	Surat Paksa				12/11/2019	2,544,832	2,544,832	
14	JAMIKA RAYA, PT	KPKNL Padang	353,603	Mar-17	penetapan lunas	353,603			8/18/2017		-	
15	BUANA PERMAI WISATA, PT/TAXI	KPKNL Padang	28,689,078	Mar-17	Surat Paksa				12/11/2019	28,689,078	28,689,078	
16	CAHAYA BINTANG ANDALAS,PT	KPKNL Padang	1,597,602	Mar-17	Surat Paksa						1,597,602	
17	TRIO UTAMA PARIAMAN, PT	KPKNL Padang	15,638,489	Mar-17	Surat Paksa						15,638,489	
18	PERSADA KARUNIA ALAM,PT	KPKNL Padang	8,371,889	Mar-17	Surat Paksa				12/11/2019	8,371,889	8,371,889	
19	RADIO KARTIKA ANGKASA NIAGA, PT.	KPKNL Padang	10,477,771	Mar-17	Surat Paksa				12/11/2019	10,477,771	10,477,771	
20	RADIO SUARA SUBUH, PT.	KPKNL Padang	3,829,814	Mar-17	Surat Paksa				12/11/2019	3,829,814	3,829,814	
21	RADIO AWANG NUSANTARA FALANDIMI KALABA, PT	KPKNL Padang	1,735,120	Mar-17	penetapan lunas	1,735,120			7/4/2019		-	
22	CV. MULTI CITA MANUNGGAAL	KPKNL Padang	768,060	Mar-17	Surat Paksa				12/11/2019	768,060	768,060	
23	LUSAKA PRIMA SWARA, PT	KPKNL Padang	1,720,534	Mar-17	Surat Paksa				12/11/2019	1,720,534	1,720,534	

No	Nama Wajib Bayar / Penanggung Hutang	Nama KPKNL	Nilai Penyerahan	Tahun Pelimpahan	Tahapan Pengurusan	Pemindahbukuan				PSBDT	Sisa Piutang	Ket
						Lunas	Angsuran	H2H	Tanggal			
1	2	6	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
24	COCA COLA AMATIL INDONESIA BOTLING-CENTRAL SUMATERA	KPKNL Padang	422,565	Apr-18	penetapan lunas	422,565			5/25/2018		-	
25	DHAVE MAKMUR BERJAYA, PT	KPKNL Padang	150,460	Jun-18	penetapan lunas	150,460			3/11/2019		-	
26	JATIMAS DIAN KENCANA, PT	KPKNL Padang	109.722	Jul-18	penetapan lunas	109.722			2/26/2019		-	
27	HOTEL FEMINA, PT	KPKNL Padang	109.725	Oct-18	penetapan lunas	109.725			7/4/2019		-	
28	BUKITTINGGI TELEVISI SUKSES MANDIRI, PT.	KPKNL Bukittinggi	53,028,124	Mar-17	Surat Paksa						53,028,124	
29	RADIO ASMI Cipta Pesona, PT	KPKNL Bukittinggi	4,128,686	Mar-17	Surat Paksa						4,128,686	
30	TRIARGA MEDIA TELEVISI, PT	KPKNL Bukittinggi	30,988,074	Mar-17	Surat Paksa						30,988,074	
31	AGAM SUMBAR LESTARI, PT	KPKNL Bukittinggi	4,197,744	Mar-17	Surat Paksa						4,197,744	
32	PATAK	KPKNL Bukittinggi	17,773,739	Mar-17	Surat Paksa						17,773,739	
33	BPR ANDALAS BARUH BUKIT	KPKNL Bukittinggi	460.453	Mar-17	Surat Paksa						460.453	
34	PT. Radio Lintas Triarga Angkasa	KPKNL Bukittinggi	1,695,309	Mar-17	Surat Paksa						1,695,309	
35	RADIO MAHKOTA GITA SWARA FM, PT.	KPKNL Padang	2,251,421	April 2019	penetapan lunas	2,251,421			9/20/2019		-	
36	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS	KPKNL Padang	164,589	Agustus 2019	penetapan lunas	164,589			9/12/2019		-	
37	GRAHA SARANA DUTA, PT	KPKNL Padang	109,725	November 2019	Panggilan Terakhir				12/17/2019		109,725	

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL **terlaksana sesuai target yang di tetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.**

d. Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Persentase (%) Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	12 laporan penanganan Waba untuk encegahan dan pengurangan waba berpiutang	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Pendistribusian SPP BHP Frekuensi Radio

NO	BULAN	BARU	RTP	STP 1	STP 2	STP 3	STP 4	JUMLAH
1	JANUARI	-	18	2	2	-	1	23
2	FEBRUARI	1	14	3	-	2	-	20
3	MARET	1	4	3	-	-	-	8
4	APRIL	1	10	5	4	4	2	26
5	MEI	1	14	8	3	--	-	26
6	JUNI	-	18	3		2	-	23
7	JULI	2	9	8	5	1	3	28
8	AGUSTUS	10	12	3	5	1	1	32
9	SEPTEMBER	3	13	4	1	-	-	21
10	OKTOBER	4	12	1	2	--	1	20
11	NOVEMBER	10	7	3	3	1	-	24
12	DESEMBER	9	13	7	-	2	1	32
Jumlah		42	144	50	25	13	9	

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian SPP, RTP, STP oleh UPT di wilayah Provinsi Sumatera Barat telah terdistribusi sesuai SPP, RTP, STP yang diterbitkan. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Terdistribusinya SPP, RTP, STP oleh UPT” **telah didistribusikan sejumlah ISR yang diterbitkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.**

e. Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	Terlaksananya UNAR	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan UNAR di Sumatera Barat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN	LOKASI UJIAN	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PESERTA			LULUS			TIDAK LULUS		
				YD	Y C	YB	YD	YC	YB	YD	YC	YB
1	28 April 2019	Hotel Pesona Alam Sangir Padang Aro Kec. Sangir	Kab. Solok Selatan	68	12	1	55	11	1	13	1	-
2	6 Oktober 2019	MAN 2 Padang Jl. Gajah Mada No.100 Gunung Pangilun	Kota Padang	109	12	2	97	12	1	12	-	1

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator "Persentase (%) Terlaksanaan UNAR" **telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.**

Dari seluruh penjelasan pada kegiatan pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penangangan BHP Frekuensi Radio, **diketahui bahwa sepanjang tahun 2019, indikator "Persentase (%) " pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penangangan BHP Frekuensi Radio telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2019, sehingga seluruh kegiatan dapat disimpulkan melebihi sebesar 112,06%.**



SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

1. IK-2.1 Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang melaksanakan layanan administrasi. Pada tahun 2019 ditargetkan 100% layanan administrasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa indikator untuk mewujudkan target tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA Rp. 20.065.243.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 4.490.461.000,- dan PNPB sebesar Rp. 15.574.782.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balmon Padang	980.532.000,	64 Layanan
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balmon Padang	25.700.000	2 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	2.249.920.000	1 Layanan
4	Layanan internal (overhead)	11.362.103.000	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	5.446.988.000	12 bulan layanan

b. Pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku

Nilai BMN pada Neraca yang disajikan pada Semester II Tahun 2019 ini adalah sebesar Rp.19.436.381.871,- yang terdiri dari nilai BMN berupa saldo awal laporan

sebesar Rp. 10.808.340.448,- dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Semester II Tahun 2019 sebesar Rp. 9.399.674.752,- dan mutasi kurang sebesar Rp.

771.633.329,-. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan pengurangan nilai BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

c. Penatausahaan kepegawaian UPT

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Padang memiliki sumber daya manusia sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 (tujuh belas) pegawai Non PNS.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : eselon III sejumlah 1 (satu) pegawai, eselon IV sejumlah 3 (tiga) pegawai, pejabat fungsional sejumlah 8 (delapan) orang, pelaksana sebanyak 13 orang dan CPNS sebanyak 2 (dua) orang. Sementara berdasarkan golongan, pegawai dengan golongan IV sejumlah 1 (satu) orang, golongan III sejumlah 21 (dua puluh satu) pegawai, golongan II sejumlah 5 (lima) pegawai . Pada tahun 2019 terdapat 1 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 9 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 5 (lima) pegawai, S1 sejumlah 11 (sebelas) pegawai, D3 2 (dua) SLTA sejumlah 7 (tujuh) pegawai, SD 2 (dua) pegawai.

d. Keuangan

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang posisi Desember 2019 adalah terserap sebesar Rp 17.834.629.067,- dari pagu Rp. 20.065.234.000,- atau sebesar 88,88%.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang melakukan revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

1) Revisi ke I tanggal 27 Maret 2019

Dengan total pagu sebesar Rp. 19.574.243.000,-

Keterangan : reivisi dilaksanakan dalam rangka pembukaan blokir pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 11.000.000.000,-.

2) Revisi ke II tanggal 29 Mei 2019

Dengan total pagu sebesar Rp. 19.774.243.000,-.

Keterangan ; Revisi dilaksanakan karena mendapatkan tambahan anggaran dari kantor pusat sebesar Rp. 200.000.000,- dalam rangka pengadaan alat perkantoran.

3) Revisi ke III tanggal 19 September 2019

Dengan total pagu sebesar Rp. 19.774.243.000,-.

Keterangan : revisi dilaksanakan karena pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap serta perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA.

4) Revisi ke IV tanggal 24 Oktober 2019

Dengan total pagu sebesar : Rp. 20.065.243.000,-.

Keterangan ; Revisi dilaksanakan karena mendapatkan tambahan anggaran dari kantor pusat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pagu minus gaji dan tunjangan, serta operasional perkantoran sebesar Rp. 291.000.000,-.

5) Revisi ke V tanggal 29 Oktober 2019

Dengan total pagu sebesar : Rp. 20.065.243.000,-.

Keterangan : Revisi anggaran dilaksanakan karena pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan pergeseran anggaran antar keluaran (output) dalam satu kegiatan.

6) Revisi ke VI tanggal 11 November 2019

Dengan total pagu sebesar : Rp. 20.065.243,-

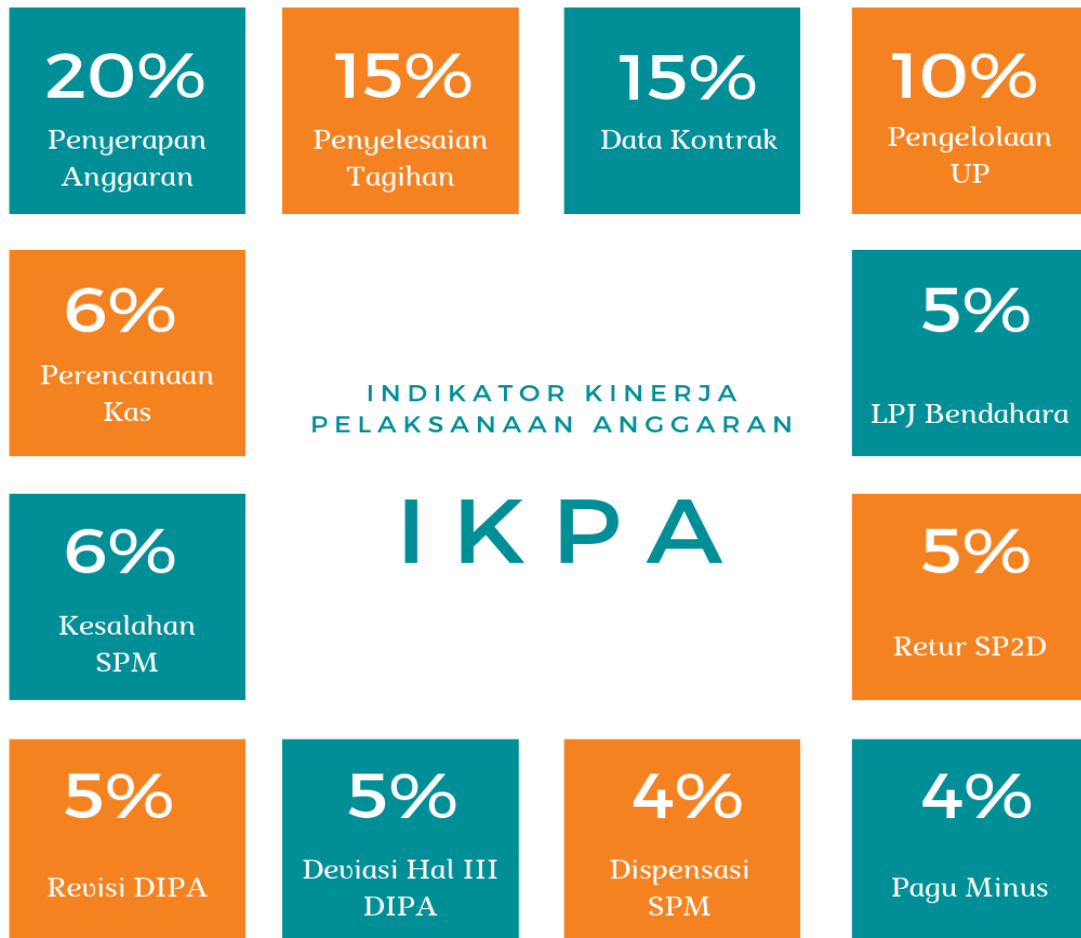
Keterangan : Revisi dilaksanakan dalam rangka perubahan rencana penarikan dalam halaman III DIPA, dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perkantoran dan mempercepat pencapaian kinerja satker, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

2. IK-2.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Kementerian Keuangan selaku BUN menerapkan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator tersebut adalah IKPA Score.

Tujuan Pengukuran IKPA yaitu :

1. **Kelancaran Pelaksanaan Anggaran** (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM);
2. **Mendukung Manajemen Kas** (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D);
3. **Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan** (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja).



Direktorat Jenderal SDPPI menetapkan target nilai IKPA tahun 2019 yaitu >94 dari skala 100. Hasil capaian IKPA Score Balmon SFR Kelas II Padang di Desember 2019 adalah sebesar 91,17%, sehingga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kesalahan SPM karena penyedia salah dalam memberikan rekening koran dan Balmon SFR Kelas II Padang melakukan beberapa kali revisi anggaran.

B. KINERJA LAINNYA

1. Pelaksanaan Kegiatan Maritim On The Spot (MOTS)

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang di tunjuk sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis untuk kegiatan Pelayanan Perizinan ISR Kapal Laut bagi pelayaran Rakyat dengan nama Maritim On The Spot (MOTS). Dalam pelaksanaan kegiatan dengan membuka loket layanan perizinan di lokasi yang dekat dengan nelayan. Adapun untuk lokasi layanan MOTS Balmon Padang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Teluk Kabung.

Selain membuka Locket Pelayanan MOTS di PPS Bungus, Balmon Padang juga membuat Locket Pelayanan bergerak dengan langsung turun pada daerah daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan di Locket MOTS PPS Bungus. Adapun daerah daerah potensial yang menjadi tujuan pelayanan perizinan bergerak meliputi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku di Tanjung Mutiara Kab. Agam, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Air Bangis di Kab. Pasaman Barat, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan dan Pelabuhan Perikanan Kambang di Kab. Pesisir Selatan.

Dari kegiatan MOTS tahun 2019 ini di dapatkan data perizinan sebagai berikut :

1. Pengunjung : 89
2. Permohonan yang sudah selesai diproses/keluar ISR atau Sertifikat
 - a. ISR belum Efektif : 3
 - b. ISR sudah Efektif : -
 - c. SOR : -
 - d. IKRAP : 97

Adapun Kendala yang di hadapi Tim MOTS yang terjun langsung kelapangan adalah sebagai berikut :

1. minimnya penggunaan perangkat Radio Marine oleh nelayan. Kebanyakan nelayan di Sumatera Barat menggunakan perangkat radio Amatir.
2. Sulitnya Masyarakat nelayan untuk mendapatkan perangkat radio Marine.
3. Kesulitan nelayan untuk mendapatkan rekomendasi dari Ditjen HUBLA dari tahap pengurusan calsign yang mengharuskan membawa kapal mereka ke Pelabuhan Teluk Bayar.

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang semula berjumlah sebesar Rp **19.774.243.000,-** namun setelah revisi berubah menjadi sebesar Rp. 20.065.234.000,- dengan realisasi sebesar Rp **17.834.629.067,-** atau **88,88 %**.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1.277.221.000	1.224.202.747	95,85,%
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang bersih, efisien dan efektif.	18.788.022.000	16.610.426.320	88,41%
TOTAL	20.065.234.000	17.834.629.067	88,88%

BAB IV PENUTUP

Tahun 2019 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang. Program kerja Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, namun masih perlu adanya peningkatan dimasa yang akan datang sehingga mempunyai perencanaan dan realisasi yang lebih baik lagi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan banyaknya perangkat informatikan yang beredar, menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tahun 2019, telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang berhasil mencapai beberapa indikator kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dan melampaui target yaitu Indikator Kinerja (IK) "Persentase kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT" dengan capaian 113,77% dari target 80%, "Persentase pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat" serta penanganan BHP Frekuensi Radio" dengan capaian 112,06% dari target 100%, dan "Persentase layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan" dengan capaian 100% dari target 100%.

Namun demikian ada Indikator Kinerja (IK) yang diakui tidak maksimal capaiannya yaitu "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)" yang hanya tercapai 91,17 dari target >94 (dari skala 100).

Demikian Laporan Kinerja Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang ini dibuat sebagai evaluasi kinerja dan sebagai indikator dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang. Pada Laporan Kinerja ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG TAHUN 2019



UJIAN NEGARA AMATIR RADIO KE II TAHUN 2019 DI KOTA PADANG FULL CAT



**UJIAN NEGARA AMATIR RADIO KE I TAHUN 2019
DI KAYU ARO KAB. SOLOK SELATAN**



**SOSIALISASI PENGGUNAN FREKUENSI RADIO
BAGI PELAYARAN RAKYAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN MARITIM ON THE SPOT**



5



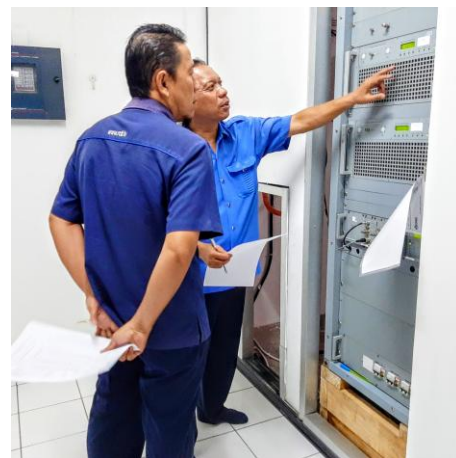
**SOSIALISASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
BAGI PELAYARAN RAKYAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN MARITIM ON THE SPOT**



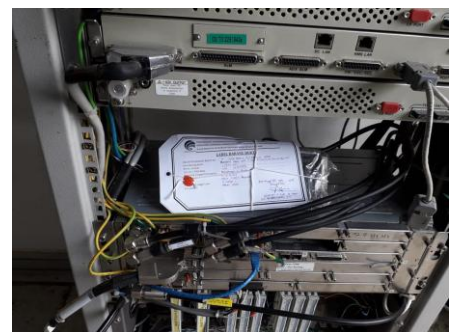
KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO



**KEGIATAN PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS DAN JANGKAUAN WILAYAH
LAYANAN LEMBAGA PENYIARAN RADIO DAN TELEVISI**



KEGIATAN INSPEKSI DAN PENDATAAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO



KEGIATAN PENERTIBAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO ILEGAL



MARITIM ON THE SPOTS



PEMBINAAN PEGAWAI BALMON SFR KELAS II PADANG



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang
Jl. Pulau Batang Kabung, Ke. Koto Tengah Padang, Sumatera Barat -25172, Indonesia
Telp. 0751 – 483722
Email : uptpdg@postel.go.id

